

BAB II

SISTEM POLITIK DI INGGRIS

Dalam bab ini penulis membahas tentang bagaimana situasi politik di Inggris dengan memaparkan gambaran sistem politik dan pemerintahan di Inggris. Mencakup sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum di Inggris.

A. Sistem Politik Inggris

Sistem politik juga dapat menjadi acuan untuk lebih memahami segala persoalan di negara Inggris. Menurut Robert Dahl, sistem politik adalah sistem yang membentuk suatu pola yang tetap dari hubungan yang terjalin antar manusia yang melibatkan makna aturan-aturan, kekuasaan dan kewenangan. Sedangkan menurut Sukarna, sistem politik ialah sistem yang mengatur atau mengelola kekuasaan dalam negara dan mempertahankan kedudukan dari sebuah kekuasaan dalam negara. Selain itu sistem tersebut juga mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya, negara dengan negara atau rakyat dengan rakyatnya.

Menurut Gabriel Almond, sistem politik adalah sistem yang meliputi kegiatan interaksi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi dari integrasi dan adaptasi sosial. David Easton menambahkan bahwa sistem politik dapat dikenali sebagai sebuah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkatan sosial, melalui makna nilai-nilai dialokasikan secara otoratif kepada masyarakat.

Tujuan sistem politik adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Menumbuhkembangkan dan menguatkan sikap politik dikalangan masyarakat secara menyeluruh.
3. Terpilihnya peyelenggara politik dari tingkat pusat hingga daerah yang sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mewujudkan cita-cita suatu bangsa.

5. Untuk membangun suatu sistem pemerintahan yang tegak dan kokoh diatas dasar untuk melaksanakan hukum.

Sistem politik yang dianut oleh Inggris adalah demokrasi. Demokrasi berasal dari Yunani Kuno pada abad ke-5 SM dengan gabungan dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi mencirikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Demokrasi memiliki dua arti. Pertama, demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Kedua, demokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln dalam pidatonya menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu pemerintahan. Sistem politik di Inggris bisa dikatakan sebagai salah satu sistem politik modern tertua di dunia.

B. Sistem Pemerintahan Inggris

Sistem pemerintahan secara etimologis berasal dari dua kata yaitu; sistem dan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah sebuah kata benda yang berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu cara pemerintah dalam mengimplementasikan suatu pandangan, teori atau asas.

Inggris adalah negara kesatuan atau yang biasa disebut dengan United Kingdom terbentuk pada tahun 1707 dengan

wilayah meliputi England, Wales, Irlandia Utara dan Skotlandia. Inggris sudah menggunakan sistem pemerintahan monarki pada abad ke-9 berubah menjadi monarki konstitusional pada abad ke-17 (Bimbie.com, 2018). Sistem pemerintahan di Inggris didasarkan pada konstitusi tidak tertulis. Inggris adalah salah satu dari negara-negara di dunia yang tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis. Sebaliknya, di Inggris yang berlaku adalah konvensi-konvensi, hukum yang berlaku umum, kebiasaan-kebiasaan tradisional dan bagian-bagian yang terpisah dari hukum tata negara. konstitusi kerajaan Inggris memang tidak memiliki bentuk yang terkodifikasi, namun aturan-aturan hukum yang memuat berbagai hal tertentu dan saling terpisah banyak ditemukan dengan istilah “*constitution*”.

Monarki konstitusional adalah Raja atau Ratu yang hanya diposisikan sebagai simbol kedaulatan negara sehingga tidak mempunyai kekuasaan politik. Sedangkan roda pemerintahan dilaksanakan oleh ada lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Namun, antara Raja atau Ratu dan pemerintah tidak berada dalam posisi yang konfrontatif atau saling bertentangan. Untuk sistem pemerintahan, Inggris menganut sistem parlementer (Susilo, 2018).

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Parlemen yang duduk di pemerintahan berhak atau memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri, dan juga dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri dan menteri atau bisa juga disebut dengan kabinet (Ibrahim, 2018).

Kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Inggris berada di tangan parlemen yang biasa disebut dengan *House of Commons* dan *House Of Lords*. *House of Commons* (majelis rendah) dapat meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan

diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan oleh majelis Rendah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya atau dengan menarik dukungan terhadap Perdana Menteri. *House of Lords* adalah adalah majelis tinggi dalam Parlemen Kerajaan Inggris. *House of Lords* tidak mengendalikan masa jabatan Perdana Menteri atau memegang kendali pemerintahan.

Dalam skema pemerintahan di Inggris, Ratu memiliki hubungan khusus dengan Perdana Menteri meskipun dalam secara konstitusional Ratu tidak mempunyai kewenangan mencampuri urusan pemerintahan dan harus bersikap netral. Tetapi Ratu boleh untuk memberikan pendapat kepada Perdana Menteri tentang jalannya pemerintahan. Ada waktu khusus yang disiapkan secara berkala untuk audiensi antara Ratu dengan Perdana Menteri.

Sistem parlemen dua kamar (*bicameral*) Inggris inilah yang menjadi cikal bakal dari sistem parlemen *bicameral* di negara-negara lainnya seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Model parlemen seperti ini dianggap sebagai bagian dari demokrasi yang tidak bisa dipisahkan.

Negara Inggris dikenal dengan sebutan *The Mother of Parliaments* atau pelopor sistem parlementer. Inggris berhasil mempraktekkan sistem parlemen ini dengan baik dan diikuti oleh negara yang lainnya. Inggris dapat mengatasi masalah sosial yang membuat kesejahteraan di negaranya meningkat melalui pemilihan demokratis dan prosedur parlementaria.

Inggris dikenal dengan sistem dwi partainya dengan pemerintahan mayoritas satu partai yang kuat dan kerap mengalami pertukaran kekuasaan antara kubu Konservatif dan Buruh. Arus suara pemilih berpindah-pindah dari konservatif ke Buruh berulang-ulang sebanyak enam kali dari tahun 1945 hingga 1987. Partai yang menang dalam pemilu adalah partai yang berkuasa pada periode tersebut dengan tugasnya menyusun pemerintahan. Namun juga terdapat partai-partai kecil yang bertindak sebagai Partai Oposisi dimana partai ini adalah partai yang kalah dalam pemilu yang bertugas mengawasi pemerintahan sehingga partai yang berkuasa pada saat itu bersikap hati-hati dalam bertindak. Secara teoritis,

partai-partai oposisi tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan. Tindakan-tindakan yang dilakukan partai oposisi lebih kepada upaya untuk mempersiapkan kemenangan pada pemilu selanjutnya.

Dari pemaparan diatas dapat diperjelas dengan, pokok-pokok pemerintahan di Inggris adalah:

1. Inggris adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisas dengan bentuk pemerintahan monarki.
2. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri dan menteri). Sedangkan Ratu sebagai kepala negara yang merupakan symbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara, tetapi tidak memiliki kekuasaan politik.
3. Parlemen terdiri dari dua kamar atau bikameral
4. Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri memegang kekuasaan pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Common dan berasal dari partai mayoritas badan ini. Parlemen dapat membubarkan kabinte dengan mosi tidak percaya.
5. Adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilu dengan posisi membentuk kabinet tandingan.
6. Inggris menggunakan system dwi partai yang slaing bersaing yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh.
7. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet, meskipun begitu, mereka menjalankan peradilan dengan bebas dan tidak memihak (Zuledi, 2018).

Secara garis besar, sistem pemerintahan yang diterapkan di Inggris memberikan pembatasan wewenang yang jelas antara eksekutif, legislatife dan kerjanaan. Sistem ini menjadi kiblat bagi negara – negara lain yang berada dibawah negara – negara.

C. Partai Politik di Inggris

Untuk mengetahui makna dan bagaimana partai politik secara mendalam maka akan dipaparkan tentang bagaimana pengertian partai, politik dan partai politik. Secara etimologis, partai berasal dari Bahasa Latin *pars*, yang berarti bagian. Jadi partai itu adalah bagian-bagian dari aktifitas demokrasi suatu negara. Menurut Jimly Asshiddiqie (Dalam Labolo dan Ilham; 09), Partai berasal dari Bahasa Inggris *part*, yang artinya bagian atau golongan. Golongan disini diartikan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideology, agama bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik.

Sedangkan politik secara etimologis, berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Budiarjo, 2007).

Jadi partai politik adalah golongan atau kelompok sosial dengan berdasarkan kesamaan tertentu untuk mendapatkan hal yang dikehendaki atas dasar kepentingan masyarakatnya. Salah satunya dengan cara meraih kekuasaan. Menurut sejarahnya, partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat. Partai politik lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain (Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015). Di sisi lain, Ranney dan Kendall mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan control terhadap birokrasi dan kebijakan publik. Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi dan sistem pemilu merupakan mekanisme dalam melembagakan kekuasaan secara konstitusional.

Inggris menganut sistem dwipartai yang dapat diartikan sebagai dua partai di antara beberapa partai. Partai tersebut menempati dua teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan mempunyai posisi dominan. Pada sistem dwipartai ini hanya terdapat dua partai politik, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Partai yang kalah berperan sebagai pengecam kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini bisa sewaktu-waktu dapat bertukar tangan.

Partai Buruh dan Partai Konservatif adalah partai dominan di Inggris yang mempunyai pandangan tidak jauh berbeda mengenai asas dan tujuan politiknya. Selain partai ini, beberapa partai kecil lainnya juga menghiasi dunia perpolitikan Inggris. Seperti Partai Hijau yang merupakan partai yang paling berada di sayap kiri di antara kesemuanya. Kemudian ada Partai Buruh yang beraliran sayap kiri. Partai Demokrat yang berada di tengah dan selanjutnya Konservatif yang cukup kanan dan disusul UKIP (*United Kingdom Independent Party*) yang paling berada di sayap kanan.

Posisi partai-partai ini dalam kompas politik juga sangat mempengaruhi kebijakan yang mereka perkenalkan ketika menjabat. Partai-partai yang beraliran sayap kiri akan lebih sosialis dalam pemikiran dan tindakan mereka, demikian pula partai yang berada di sayap kanan akan sesuai dengan ideologinya. Meskipun begitu, sesuai dengan kepentingan nasional, partai-partai ini juga sangat mungkin mengubah ciri kebijakannya saat diperlukan. Salah satu contohnya ada Partai Buruh yang beberapa tahun sebelum ini cukup mengambil kebijakan sayap kanan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Demikian pula, tindakan individu dalam partai juga dapat saja berbeda dengan pemikiran partai.

Selain berasal dari partai-partai yang telah disebutkan di atas, ada pula partai-partai nasional (*National Party*) misalnya *Scottish National Party* atau SNP. Demikian pula, ada yang disebut sebagai kandidat independen, yang terdiri dari orang-orang yang cukup populer untuk dipilih tanpa perlu bergabung dengan salah satu partai politik.

Ada pula sebuah partai politik unik yang tidak mempunyai kursi di parlemen, namun memiliki beberapa kandidat yang terpilih sebagai pemerintah lokal: *Official Monster Raving Loony Party* yang terdiri dari orang-orang eksentrik dengan pakaian yang luar biasa aneh dan berwarna-warni.

Secara umum, ketua partai akan menduduki posisi perdana menteri ketika partai yang dipimpinnya memenangkan pemilihan umum dan mendapat perolehan suara terbesar di parlemen. Sedangkan rivalnya yang tidak mendapat cukup mayoritas kursi akan menduduki kursi oposisi dan membentuk kabinet bayangan. Kabinet bayangan ini dibentuk sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *Leader of the Opposition* akan mengawasi dengan baik Perdana Menteri, demikian pula *Shadow Education Secretary* akan mengeluarkan kritik terhadap *Education Secretary*.

Semua hal ini akan dikemukakan dalam debat terbuka maupun tertutup di *House of Commons* yang merupakan salah satu bagian parlemen di Inggris Raya yang berkedudukan di Westminster. Di dalam debat-debat inilah pihak pemerintah akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang datang dari seluruh anggota parlemen, dan dalam waktu yang sama juga mempertahankan kebijakan yang telah dirancang oleh mereka sebelum akhirnya menjadi kebijakan lebih lanjut yang akan diperkenalkan ke publik.

Hal ini dilakukan di parlemen mengingat sistem demokrasi yang meletakkan pemerintah di satu sisi dan pengawas pemerintah di sisi lain yang mengawasi dan dalam waktu-waktu tertentu juga harus menghentikan kebijakan. Praktik semacam ini mungkin terlihat sangat agresif, namun demikianlah bagaimana sistem politik di Inggris Raya berjalan supaya setiap suara didengar di parlemen.

Partai konservatif membentuk koalisi dengan Liberal Demokrat dan membentuk kabinet pemerintah bersama dengan mereka. Demikian pula, ini adalah hal yang direncanakan Buruh pada tahun-tahun ini dengan membentuk koalisi bersama

beberapa partai untuk mempersiapkan pertempuran pada pemilihan umum berikutnya. Pada tahun 2017 ini, Partai Konservatif memiliki sedikit mayoritas kursi sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan, meskipun dengan serangan dari berbagai sisinya.

Sistem politik nasional juga dibantu oleh sistem politik lokal yang terdiri dari council yang dipimpin oleh seorang councillor. Dalam ranah yang lebih besar, kita juga mengenal ward yang terdiri dari beberapa council dan dipimpin oleh seorang mayor. Di London sendiri, terdapat lebih dari tiga puluh council dan merupakan satu ward tersendiri yang dipimpin oleh seorang *Mayor of London* yang berkedudukan di London Assembly. Demikianlah sistem politik Inggris Raya yang mempertahankan Inggris selama berabad-abad hingga tetap mempertahankan posisinya sebagai negara besar.

Profil UKIP (United Kingdom Independence Party)

UKIP (*United Kingdom Independent Party*) merupakan partai politik populis Eurosceptic yang beraliran sayap kanan di Inggris. UKIP pertama kali diperkenalkan oleh sejarawan Alan Sked pada tahun 1991. Kemudian resmi didirikan pada tanggal 3 September 1993 di London School of Economics oleh anggota Liga Anti-Federalist, yang telah didirikan oleh Dr Alan Sked pada bulan November 1991 dengan tujuan untuk menjalankan kandidat yang menentang Perjanjian Maastricht pada pemilihan umum tahun 1992 (Hunt, UKIP: The story of the UK Independence Party's rise, 2014).

Pemimpin partai saat ini adalah Henry Bolton. Saat ini UKIP memiliki tiga perwakilan di House of Lords dan 19 Anggota Parlemen Eropa (MEP), menjadikannya sebagai partai Inggris terbesar ketiga di Parlemen Eropa. Ini memiliki lima Anggota Majelis (AM) di Majelis Nasional untuk Wales, dua anggota di Majelis London, dan 218 anggota dewan di pemerintah daerah.

Berdirinya UKIP berlatar belakang kekecewaan masyarakat Inggris terhadap Uni Eropa atau biasa disebut dengan kelompok *Eurosceptic*. Partai ini bukan termasuk partai superior karena masih terbilang baru di dunia perpolitikan Inggris. Dimulai dari didirikannya, pertumbuhan UKIP sangatlah lambat karena sebagian besar dikalahkan oleh Partai Referendum Eurosceptic sampai tahun 1997. Pada tahun 1997, Sked digulingkan oleh sebuah faksi yang dipimpin oleh Nigel Farage, yang menjadi tokoh partai yang sangat berprestasi.

Knapman mengambil alih peran pemimpin pada tahun 2002, namun pada tahun 2004 Robert Kilroy-Silk mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan. Tak lama kemudian dia secara terbuka memperjuangkan kepemimpinan dan menjadi media partai untuk keberhasilan pemilihan Eropa 2004, tetapi Knapman menolak untuk menyingkir sehingga Kilroy-Silk berhenti dan membentuk partai saingannya sendiri yang berumur pendek.

Pada tahun 2006 Knapman pensiunan Farage yang dikenal pemain media yang *eye-catching* secara resmi menjadi pemimpin UKIP. Janji yang dilontarkan pertama kali adalah menjadikan UKIP sebagai partai yang benar-benar representatif, yang mengakhiri citranya sebagai kelompok tekanan tunggal. Farage adalah sosok dibalik kesuksesan pada pemilihan Eropa tahun 2009 dan mengangkat profil UKIP.

Di bawah arahannya, partai ini mengadopsi sebuah platform kebijakan yang lebih luas dan memanfaatkan kekhawatiran tentang meningkatnya imigrasi, khususnya di kalangan kelas pekerja Inggris Putih. Tekanan utama UKIP ada pada Euroscepticism. UKIP merupakan kubu yang secara terbuka berkampanye agar Inggris keluar dari Uni Eropa. Salah satu partai yang menjunjung tinggi persatuan Inggris dan mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi terhadap Inggris. UKIP mendorong masyarakat agar menjaga identitas Inggris dengan

penekanan pada tingkat penurunan imigrasi, menolak multikulturalisme, dan menentang apa yang disebutnya "Islamisasi" Inggris.

Memiliki warisan ideologis yang berasal dari sayap kanan Partai Konservatif, ia membedakan dirinya dari pendirian politik arus utama melalui penggunaan retorika populis yang berat, termasuk menggambarkan pendukungnya sebagai "Tentara Rakyat". Sementara itu, untuk mendapat dukungan pemilihan dari berbagai sektor masyarakat Inggris, basis pemungutan suara utamanya ada di Inggris dan sebagian besar terdiri dari orang Inggris berkulit putih kelas pekerja.

D. Sistem Pemilu di Inggris

Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ilmu berpendapat bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Seperti negara-negara demokrasi lainnya, Inggris melakukan pemilu untuk memilih anggota legislatif. Dengan sistem dwipartai yang dipakainya, Inggris diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single-member constituency (Sistem Distrik) dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja (Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015)).

Sejak tahun 1970-an, Inggris tidak pernah benar-benar menjadi negara dua partai. Pada 1974, SNP mendobrak kejayaan Partai Buruh dan Partai Konservatif dengan memenangkan tujuh kursi parlemen. Pada 1977 pemerintahan Partai Buruh harus membuat kesepakatan dengan Partai Liberal untuk bisa bertahan. Dan pada 1980-an, sejumlah anggota Partai Buruh memisahkan diri untuk membentuk satu kelompok baru yang akhirnya bersatu dengan Partai Liberal untuk membentuk Partai Liberal Demokrat.

Meski demikian, sistem pemilu Inggris Raya membuat pemilu berakhir dengan satu partai yang berkuasa. Sistem ini dikenal dengan nama *first-past-the-post*, atau pemenang setiap daerah pemilihan mendapatkan satu kursi di parlemen.

Sementara kandidat yang kalah tidak mendapatkan apapun. Hal ini bisa membuat partai-partai kecil hanya menempatkan sedikit wakil di parlemen, atau bahkan tidak ada wakil sama sekali, bahkan jika mereka memenangkan jumlah suara yang besar di seluruh wilayah sekalipun.

Metode *first-past-the-post* ini menutupi perubahan bertahap dalam dukungan politik yang terjadi akibat perubahan sosial dan ekonomi. Terutama ketika kelas sosial di Inggris Raya semakin tidak jelas dalam beberapa dekade terakhir (Yns, 2018). Dalam pemilu 2010 Partai Buruh meraih 41 kursi dari 59 kursi di Skotlandia. Jajak pendapat memperlihatkan bahwa SNP bisa menghancurkan dominasi Partai Buruh di wilayah tersebut dalam pemilu kali ini.

Perusahaan jajak pendapat YouGov menyebutkan bahwa sekitar 45 persen warga yang berubah menjadi pendukung UKIP sejak 2010 berasal dari Partai Konservatif, 17 persen dari Partai Liberal Demokrat, 15 persen dari Partai Buruh dan 15 persen adalah warga yang belum pernah memilih. Untuk menjadi mayoritas, satu partai harus memenangkan 323 kursi tetapi Partai Konservatif dan Partai Buruh hanya diperkirakan memperoleh 280 kursi. UKIP bisa memenangkan 10 persen suara di tingkat nasional dan hanya mendapat tiga kursi atau lebih kecil. Sementara, SNP bisa mendapat 40 kursi dari hanya tiga persen suara yang diperolehnya karena pendukungnya berpusat di daerah pemilihan yang lebih sedikit.

Pada awal mula kemunculannya, UKIP (*United Kingdom Independent Party*) tidak memiliki eksistensi sama sekali. Selama ini, panggung politik Inggris hanya dikuasai oleh tiga partai besar yaitu, Partai Konservatif, Partai Buruh dan Partai Liberal Demokrat. Pemerintahan saat ini adalah koalisi antara Partai Konservatif dan Partai Liberal Demokrat.

Aksi ramah media dan usaha yang keras dilakukan oleh UKIP dengan membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan

bertahun-tahun di daerah setempat. Semakin lama upaya kampanye partai yang dilakukan oleh UKIP menjadi jauh lebih profesional dan didanai dengan baik dalam tiga tahun terakhir. Sebagai hasilnya, sekarang UKIP banyak dilirik oleh masyarakat Inggris. Hal ini diperlihatkan dengan jumlah anggotanya yang pada saat ini sudah mencapai 36.000 orang dan masih banyak permohonan yang masuk. Meningkatnya dukungan masyarakat Inggris terhadap UKIP karena sikapnya yang anti terhadap Uni Eropa. Sehingga UKIP berhasil meraih kursi di Parlemen Inggris.

Keberhasilan awal UKIP dalam pemilihan perwakilan proporsional untuk Parlemen Eropa dengan memenangkan tiga kursi pertamanya pada tahun 1999 dengan 7% suara. Pada tahun 2001, UKIP menyimpan depositnya hanya dalam satu kursi atau setara dengan 5% suara. Sedangkan pada tahun 2004, memenangkan 12 kursi dan mendorong Liberal Demokrat ke posisi keempat. Pada tahun 2005, UKIP menyimpan depositnya di 38 kursi namun kehilangan deposit di 451 lainnya dengan biaya sekitar £225,500. Bahkan pemimpinnya saat itu, Roger Knapman, hanya bisa mengoleksi 7% suara di Totnes, Devon.

Jajak pendapat tahun 2009 melihat totalnya tumbuh menjadi 13 kursi, mendorong Buruh ke tempat ketiga dengan 16% suara. Pada tahun 2010, UKIP maju di pemilihan umum dipimpin oleh Lord Pearson dari Rannoch dengan mendapat 3% suara di Inggris. Dan pada pemilihan Eropa 2014 partai tersebut bertahan sesuai janji percaya dirinya untuk mendapatkan suara terbanyak, dengan mendapatkan suara 27,5%. Farage melakukan terobosan yang signifikan pada pemilihan lokal 2013, pemilihan Eropa 2014, dan pemilihan umum 2015. (Hunt, 2018).

